

**DINAMIKA GOLONGAN LEMAH PEDESAAN  
REFLEKSI ATAS KARYATULIS DAN PEMIKIRAN  
PROF. DR. SAJOGYO**

**Oleh :**  
**Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro**

**PIDATO PENGLEPASAN PURNA BHAKTI  
GURU BESAR IPB 1991**

## **DINAMIKA GOLONGAN LEMAH PEDESAAN REFLEKSI ATAS KARYATULIS DAN PEMIKIRAN DR.SAJOGYO**

**Oleh : Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro<sup>\*</sup>**

### **I. PENDAHULUAN**

Menelusuri apa yang menjadi pusat perhatian seorang pakar seperti Dr.Sajogyo, yang perhatiannya memang bercabang dan beranting luas, memang tidak mudah ! Kariernya yang cukup panjang rasanya mengundang telusuran seperti itu dan tentu saja jumlah karyatulis yang puluhan buah, sedikit banyak dapat menjadi pedoman dalam menelusuri makna perhatian tersebut. Karangan ini dimaksud sebagai suatu usaha ke arah itu.

Dalam salah satu pereakapan akrab sambil bertatap muka terungkap oleh Sajogyo bahwa memperhatikan dan mengamati petani kecil atau "gurem" di daerah pedesaan memikatnya sejak muda.

Sewaktu penjajahan Jepang (1942 - 1945), disusul oleh revolusi fisik untuk menegakkan Republik Indonesia dan usaha-usaha awal mengisi kemerdekaan (1945 - 1950) tentu bidang pertanianlah yang masih dominan sekali. Sektor perdagangan atau lebih lagi sektor industri masih begitu tertinggal di masyarakat kita sehingga tidak mengherankan apabila pusat perhatian diarahkan kepada petani kecil di pedesaan.

Semasa revolusi banyak diantara pemuda kita yang menyatu serta berbagi nasib dengan rakyat pedesaan dan tahap dalam sejarah Indonesia tersebut tampaknya juga memperkuat perhatian kaum cendikiawan terhadap pedesaan.

Studi Sajogyo (dahulu masih Kampto Utomo) yang pertama, karena itu mencerminkan konvergensi beberapa pusat perhatiannya. Mempelajari nasib kolonis dan transmigran di Lampung (1957) sekaligus mencakup perhatian atas bidang pertanian dalam masyarakat baru, maupun memperhatikan nasib bekas pejuang revolusi fisik, dalam mana Sajogyo juga memberi sumbangannya. Masyarakat baru yang dibangun oleh pelopor kolonisasi (*truko*) dan pemimpin-pemimpin eks-pejuang yang tergabung dalam Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) dan Corps Tjadangan Nasional (CTN) memberi gambaran yang sangat dinamis. Bukan saja membuka hutan, membangun pemukiman baru dan persawahan, tetapi juga dalam penyesuaian kepada lingkungan alam yang berbeda dengan Jawa, tampak proses perubahan pola-pola pertanian.

Inilah kesan kuat yang diperoleh dari membaca disertasi Kampto Utomo "Masyarakat Transmigran Spontan di daerah Way Sekampung, Lampung". (1957)

Karya tulis ini praktis menjadi studi sosial-ekonomi pertama mengenai para transmigran oleh seorang Sarjana Indonesia, dan program tersebut juga dapat dilihat sebagai penerus program kolonisasi zaman Hindia Belanda, dengan berbagai perbaikan.

Mungkin karena ini juga disertasi tersebut diterjemahkan dalam bahasa Belanda (197.) dan mengalami cetak menjadi buku oleh Gadjah Mada University Press (1975).

<sup>\*</sup> Guru Besar pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Seperti diakui oleh Kampto Utomo sendiri dalam studi tersebut ia belajar banyak dari seorang gurubesar agronomi almarhum Dr. Karl J. Pelzer dari Universitas Yale, A.S. yang segera setelah perang dunia kedua menerbitkan buku tentang "Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics" (1945).

Berbeda dengan Kampto Utomo yang menekuni ilmu pertanian dan anthropologi sosial, Pelzer sebagai ahli geografi dan agronomi memperhatikan sistem perladangan dan penyesuaian pendatang baru kepada keadaan setempat. Segi-segi agronomi dan ekologi lebih menonjol daripada segi sosio-anthropologi atau ekonomi yang dalam disertasi Kampto Utomo justru lebih kuat penampilannya.

Singkatnya kedua studi tersebut diatas merupakan saling pelengkap yang baik dibidangnya, yaitu pembukaan daerah baru, pemukiman dan pengembangan pertanian menjadi bacaan klasik.

Bukan maksud penulis untuk menelusuri semua publikasi Sajogyo setelah disertasinya itu, tetapi tentu penulis tidak dapat melepaskan diri dari mengacu kepada beberapa "tonggak karya tulis" yang menyusul kemudian dalam karier akademisnya. Satu ciri khas Sajogyo, pada hemat penulis ialah karena hampir dalam setiap karya tulis tampil kemuka segi *Dinamika Golongan Lemah di Pedesaan* itu. Perjuangan hidup dan usaha mereka untuk bertahan hidup bahkan memperbaiki nasibnya dalam segala keterbatasan. Keperihatinan seperti inilah yang mencirikan Sajogyo sebagai seorang cendekiawan dan bukan semata-mata seorang Sarjana. Perikemanusiaan dan Keadilan adalah nilai yang harus ada dalam sanubari seorang cendekiawan.

## II. PANGAN SEBAGAI KEBUTUHAN DASAR

Sejak tahun lima puluhan, selaku staf pengajar Fakultas Pertanian, Sajogyo sudah tertarik pada masalah pangan sebagai satu kebutuhan dasar utama orang Indonesia. Dalam lingkungan kampus Fakultas Pertanian di Bogor, waktu itu masih bernauung dibawah Universitas Indonesia, Sajogyo melakukan penelitian mengenai gizi mahasiswa Fakultas Pertanian. Penelitian mengenai kesejahteraan mahasiswa ini juga mencerminkan keperihatinan dan solidaritasnya terhadap mahasiswa sebagai golongan lemah di kampus, sekali ini pada skala yang lebih mikro.

Tetapi tidak kurang perhatiannya kepada masalah-masalah makro nasional, seperti meningkatkan produksi pangan. Perhatiannya terhadap program Padi Sentra (1950-an), dan kemudian terhadap masalah-masalah keswasembadaan beras dan kebutuhan dasar manusia lain menunjukkan perhatiannya yang lebih makro.

Sejak dini langkah-langkah pemerintah mengarah ke "revolusi hijau" atau revolusi teknologi dibidang tanaman pangan diperhatikannya, dan terlebih setelah diberi tugas memimpin Survey Agro-Ekonomika Indonesia (SAEI), kesempatan meneliti "revolusi hijau" bertambah luas.

Sebelum SAEI dilahirkan (1964), sebenarnya di Bogor sudah ada kelompok Badan Koordinasi Survey yang mengkoordinir dan membimbing team survey pertanian yang terdiri atas peneliti-peneliti dari lembaga penelitian pertanian di Bogor dan I.P.B. Minat meneliti, mendidik dan membentuk

kader sudah berakar dalam karier Sajogyo yang panjang, motivasi mendidiknya, harus diakui ; sangat tinggi !

Pada tahun 1969 terbitlah hasil studi evaluasi pertama mengenai program peningkatan produksi beras, bersama dengan Agricultural Development Council (A/D/C).

Dengan terbitnya hasil studi evaluasi pertama tentang usaha peningkatan produksi padi, yang dilakukan bersama dengan Agricultural Development Council (A/D/C) mulai tampak bahwa alih teknologi di bidang pertanian berbeda gambarannya bila ditinjau dari sudut pandang lapisan petani: kaya, menengah dan miskin.

Penelitian di 15 Kabupaten ini kembali mempermasalahkan dinamika di kalangan petani berbagai lapisan.

Petani sample digolongkan menurut luas penguasaan tanah dan dihubungkan dengan kesediaan masing-masing golongan menerima teknologi yang ditawarkan melalui BIMAS dan INMAS lebih menarik untuk petani yang berlahan garapan tiga perempat hektar atau lebih luas. Yang menguasai setengah hektar tergolong penerima paket teknologi yang lamban (*slow adopters*), sedangkan sebagian terbesar petani berlahan sempit (< 0,5 ha) paling tidak tertarik pada BIMAS dan INMAS. Golongan terakhir ini tidak berani menerima paket, karena khawatir dikemudian hari tidak dapat membayar kredit kembali, terlebih bila diduga akan terkena musibah hama atau banjir, sehingga resiko panen gagal besar.

Dengan kata lain mereka tidak berani menanggung resiko terlalu besar, walaupun membutuhkan kredit. Kekhawatiran tak dapat membayar (mencicil) hutangnya kembali itulah yang menghalangi mereka untuk mengambil kredit.

Karena dinamika seperti ini dahulu belum dimengerti oleh banyak penyuluh BIMAS/INMAS penyebaran program dengan dorongan keras PPD tak jarang oleh petani kecil dirasakan sebagai paksaan.

Lambat laun petani kecil tersisih dalam program BIMAS yang kelihatan sudah dalam Sensus Pertanian 1973, walaupun luas areal padi dan produksi padi itu sendiri meningkat. Penguasaan tanah lebih di tangan kaum tani yang berkecukupan atau kaya. Besar kemungkinannya akumulasi tanah menguntungkan yang kaya dan mendesak golongan buruh tani ke kota, keluar dari sektor pertanian.

Inilah yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan suatu penelitian yang memanfaatkan Sensus Pertanian 1963, adanya : "Modernisasi, tanpa pembangunan". (*Modernization without development*).

Dalam pada ini jelas ternyata Sajogyo menggunakan istilah "development" dalam arti lain dari pada bahasa politik atau koran. Development diartikan perbaikan struktur sosial demikian rupa sehingga golongan lemah yang bertambah baik kemandiriannya, kedudukannya maupun nasibnya. Yang terjadi sebaliknya petani golongan lemah kehilangan tanah dan kesempatan kerja di desa dan memasuki sektor industri di kota, karena pertanian di pedesaan sudah jenuh tenaga.

Jadi perubahan dapat saja terjadi tanpa terlalu memperbaiki nasib segenap warga masyarakat. Ketimpangan antar lapisan bisa terjadi akibat pembangunan, yang dari sudut ekonomi politik lebih sering diartikan kemajuan fisik.

Bedanya dengan perubahan sosial ialah bahwa paling tidak kemajuan itu mempengaruhi perubahan dalam struktur masyarakat juga.

Dari sudut pandang dan nalar Sajogyo di atas muncul satu proposisi dengan jelas, yaitu bahwa penyuluhan-penyuluhan pertanian, agar berhasil dalam pekerjaannya harus mampu melakukan analisa sosiologi terhadap kelompok sasarannya. Bila penyuluhan hanya pandai berkomunikasi tetapi tidak menghayati sosiologi masyarakat yang digarapnya, belum ada cukup jaminan untuk meraih keberhasilan dalam misi penyuluhannya.

### III. GIZI

Setelah kira-kira satu dasawarsa penelitian pangan, perhatian Sajogyo beralih kembali kepada gizi, sesuatu yang sudah diperhatikannya dalam dasawarsa 1950-an di kampus ; awal 1960-an suatu permintaan dari UNICEF dan pemerintah RI melibatkan Sajogyo dalam penelitian tentang gizi penduduk daerah pedesaan. Sebelumnya memang ada juga suatu studi tentang kebiasaan-kebiasaan diet suku bangsa Indonesia (M. Tan 1970), tetapi Sajogyo menjurus kepada pengukuran konsumsi berbagai ramuan dieet.

Awal 1960 Sajogyo sendiri juga sudah menjadi pengajar di Akademi Gizi di Bogor.

Penelitiannya menjadi suatu kombinasi dari pemanfaatan data statistik tingkat nasional dan survei rumah tangga di kl. 5 Kabupaten. Memang konsumsi gizi dapat ditelusuri dari bagian penghasilan yang dibelikan pangan oleh keluarga tani, dan apa yang dimakan oleh keluarga tani. Kedua-duanya pendekatan ditetapkan dalam penelitian ini, sehingga akhirnya dapat digambarkan tingkat pendapatan, berapa yang dikonsumsi untuk pangan, atau komposisi makanan menurut unsur karbohidrat, protein hewani/nabati dan vitamin A.

Sampailah kemudian tim peneliti yang diketuai Sajogyo pada masalah "garis kemiskinan" yang dalam awal 1970-an memang mulai ditekuni juga di negara seperti India (Dandekar & Rath, 1970). Toh, Sajogyo tidak sepenuhnya mengandalkan pada variabel ekonomi: "pendapatan", karena ini suatu hal yang sering sukar dihitung dengan cermat, kalaupun petani menjawab dengan jujur. Ekonomi uang di pedesaan belum menembus berbagai segi kehidupan.

Karena itu dicoba dicarikan tolok ukur yang lebih realistik dan itu dianggap "nilai setara konsumsi beras". Ekonomi uang di daerah pedesaan belum sepenuhnya berfungsi, tetapi beras menjadi "pencerminan nilai" yang penting. Karena itulah konsumsi setara nilai beras dipegang sebagai penggambaran garis kemiskinan. Sebagai dapat dilihat ukuran ini lebih mutlak, dan pengertian kemiskinan memang diukur dengan tolok ukur yang mutlak: gizi, kalori dan protein serta vitamin A seorang sehari.

Tidak berarti bahwa Sajogyo mengingkari "Delapan jalur pemerataan" yang tidak mengandung tolok ukur mutlak semata-mata. Tetapi waktu itu sebagai langkah pertama belum terpikir bahwa "akses" terhadap berbagai jasa dan pelayanan atau "tidak-akses" (*deprivation*) juga dapat menjadi ukuran kemiskinan (relatif).

Perlu juga dikemukakan bahwa sikap pemerintah waktu itu (1973) belum setoleran sekarang. Pada awal Pelita I, Kabinet Pembangunan I masih peka terhadap komentar yang mengungkapkan kenyataan. Kemiskinan adalah suatu topik yang lebih baik jangan terlalu luas dibicarakan.

Kepercayaan diri pemerintah semakin menebal dan terlebih setelah swasembada pangan (1984) tereapai, sebenarnya lebih toleran terhadap kritik yang semula dianggap "sumbang".

Sudah jelas bahwa untuk telinga politik tereapainya swasembada pangan lebih enak didengar dari pada kemiskinan yang masih menghinggapi 50% dari penduduk Indonesia (1973).

Lebih lagi setelah pertumbuhan penduduk menurun (1985 : 2.0%) dan kemudian dinyatakan kemiskinan sudah turun sampai 30% (1990) kita mulai berani bertepuk dada dan berbicara pula tentang kemiskinan.

#### IV. GARIS KEMISKINAN

Sekarang garis kemiskinan secara umum sudah lebih dapat diterima. Semula memang kecukupan pangan ditargetkan pada 1968 (Workshop on Food, LIPI + USNAIS) pada konsumsi kalori 2200 perhari.

Ini juga yang dipegang teguh oleh Sajogyo sebagai suatu sasaran pembangunan dan tolok ukur keberhasilan sewaktu mengadakan penelitian Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (1973).

Ternyata memang ada provinsi yang dapat mencapai sasaran tersebut walaupun di Jawa masih pada tingkat 1700-1800 kalori per kepala/hari.

Keswasembadaan beras sebenarnya juga disusul dengan keswasembadaan sandang, walaupun konsumsi rata-rata bangsa kita masih dibawah banyak negara tetangga di Asia.

Pada pertengahan 1970-an berkembang diskusi yang meluas mengenai garis kemiskinan. Semata-mata berpegang pada tolok ukur konsumsi kalori dan gizi setiap kepala per hari dirasakan semakin kurang memadai, sementara mencari data tentang konsumsi keperluan lain juga masih sukar.

Mulailah kedengaran gagasan tentang "keranjang makanan" (food basket) seperti di negara-negara Barat a.l. Amerika Serikat, yang juga dapat diterapkan di Indonesia agar ramuan pangan lebih lengkap !

Lalu langkah berikut adalah mencari pola-pola konsumsi dengan memanfaatkan data SUSENAS dari B.P.S. Memang inipun dapat dipertanyakan seberapa jauh dapat mencerminkan garis kemiskinan ?

Namun demikian pola konsumsi dari berbagai lapisan masyarakat, di daerah pedesaan dan perkotaan secara lebih lengkap mencerminkan pengeluaran mereka sehingga merupakan *proxy* yang melengkapi konsumsi pangan saja. Karena itu barangkali Bank Dunia juga tertarik dan banyak menggunakan data SUSENAS untuk menghitung garis kemiskinan Indonesia dalam laporan mereka tentang kemiskinan (Mei, 1990). Penurunan kemiskinan tentu berita menggembirakan bagi rakyat dan pemerintah Indonesia yang semakin percaya diri atas ketepatan kebijaksanaan pembangunannya.

Sementara itu dampak kebijaksanaan "Delapan jalur pemerataan" yang sejak Pelita II dilaksanakan mulai terasa; selanjutnya prasarana, transportasi dan

pendidikan membaik dan cepat meluas, sehingga terjadi "revolusi" transportasi, komunikasi dan pendidikan, setelah revolusi hijau membawa swasembada beras.

## V. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Lembaga Swadaya Masyarakat juga sudah diminati dan diperhatikan Sajogyo sejak lama; praktis perhatian ini sudah tercermin waktu mempelajari transmigran spontan di Lampung yang mengorganisir diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dilingkungan yang baru dan sebelumnya belum mereka kenal.

Larangan pemerintah untuk membatasi kegiatan berbagai bentuk organisasi di daerah pedesaan karena itu dapat diduga juga tidak berkenan dihati Sajogyo. Hanya membenarkan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah seperti kelompok tani, PKK, Koperasi, Kelomponeapir dan sebagainya sering menjadi pendekatan yang terlalu menekan kebawah, dan meredam prakarsa yang spontan dari golongan lemah, yang sebenarnya cukup cerdik untuk meneari pemecahan atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Hanya mereka kekurangan modal, peralatan dan juga pengetahuan mutakhir. Tetapi pengalaman mereka sering kita anggap remeh, walaupun itu modal yang sangat berharga, juga sebagai pedoman meneari pemecahan masalah.

U.U. Organisasi Kemasyarakatan no. 8/1985 karena itu mengandung janji yang menggembirakan, karena memberikan harapan LSM dapat dianjurkan kembali, walaupun pelaksanaannya masih perlu ditunggu.

Minat Dr. Sajogyo terhadap kegiatan LSM adalah suatu perwujudan untuk memuaskan perhatiannya atas persoalan partisipasi, prakarsa dari kelompok masyarakat bawah. Beberapa tulisannya mencerminkan minat dan perhatiannya itu.

Mungkin juga karena itu pendidikan motivator dalam pembangunan sangat banyak diperhatikannya. Kerjasama dengan LSM Bina Desa dan pendidikan motivator pertanian di Ungaran yang didirikan Pak Sarino, sudah dilakukan sejak 1970-an. Kepuasan tentu juga berasal dari kesempatan untuk menguji di lapang apa yang dipikirkan diruang kerja atau kuliah.

Hal ini menjawab pikiran Sajogyo, ilmu adalah milik yang harus diabadikan/diamalkan oleh ilmuwan didalam masyarakatnya. Bila tidak ilmu akan mandul dan tidak berkembang.

Sajogyo percaya bahwa bukan rakyat pedesaan saja dapat belajar dari kita yang berpendidikan formal, tetapi, kitapun harus belajar dari pengalaman petani di daerah pedesaan.

## VI. PERHATIAN UNTUK LINGKUNGAN

Sebagai seorang ahli pertanian dan anthropologi sosial, Sajogyo berpegang pada pandangan yang "wholistic" tak ada gejala yang terjadi terlepas dari gejala lain. Dan karena itu tidaklah mengherankan mengapa Sajogyo juga memperhatikan lingkungan interaksi antara sumberdaya alam dan manusia sebagai populasi yang memanfaatkannya.

Buku "Ekologi Pedesaan" (1984) yang disunting Sajogyo mencerminkan perhatian tersebut, dan dengan menyebut istilah pedesaan sebenarnya bukan hanya populasi petani yang dibicarakannya, tetapi juga populasi yang sebenarnya tidak menguasai sumberdaya alam lagi, tetapi toh berusaha bertahan hidup di daerah pedesaan.

Dalam buku ini dengan jelas ditampilkan keperihatinan mengenai cara tanah, air, daerah perkebunan dan aliran sungai dimanfaatkan dan dikelola. Sebagai pakar yang memperhatikan lingkungan Sajogyo tidak terlepas dari dorongan untuk memberi peringatan kepada warga masyarakat, bahwa setelah penduduk daerah pedesaan bertambah kita juga perlu lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam. Sebelum istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dipopulerkan oleh KLH dan ekonom, pemikiran ini sudah berkecambah di lingkungan kami, IPB.

Tanggung jawab nasional ini tidak pula terlepas dari konsensus yang tercapai di dunia internasional, misalnya melalui Deklarasi Vancouver , Kanada. Pola-pola penggunaan tanah dalam buku tersebut menjadi salah satu perhatian utama, tetapi juga nasib golongan lemah di daerah pedesaan kembali ditampilkan sebagai masalah penting.

## VII. DIALOG KEMISKINAN

Banyak pembaca karya tulis Sajogyo pasti akan sefaham dan mengakui konsistensi pemikirannya tentang golongan lemah di daerah pedesaan dan dinamika yang mereka peragakan dalam mengusahakan pemecahan berbagai masalah.

Karena perhatian inilah mungkin Sajogyo diasosiasikan dengan studi kemiskinan. Tetapi masalahnya begitu luas cakupannya dan kaya akan sudut pandang, sehingga mau tak-mau tentu menimbulkan dialog, percaturan baik mengenai pengertiannya , maupun tentang tolok ukurnya.

Di Institut Pertanian Bogor banyak penelitian berkiblat pada studi kasus yang umumnya juga mencerminkan skenario mikro. Sajogyo termasuk dalam kelompok ini juga: mengangkat kasus ketingkat yang lebih makro, dan sering menggunakan rumah tangga sebagai unit analisa.

Sebaliknya para pakar ekonomi sering menggunakan data statistik, yang digali dari survai-survai nasional yang besar; pendekatan yang makro ini tidak selalu sesuai benar dengan studi mikro, bahkan dalam kolokium di Den Haag yang diselenggarakan oleh Menteri Jan Pronk mengenai kemiskinan di Indonesia (9-10 April 1991) timbul kesan bahwa Indonesia terdapat "Makro optimisme" dan Mikro pessimisme" mengenai issue kemiskinan.

Di Indonesia suara ekonom agak optimis yang diawali oleh pernyataan-pernyataan Prof. Sumitro, yang mengacu pada laporan Bank Dunia (Mc 1990). Indonesia berhasil menyesuaikan struktur ekonominya dengan keadaan dan tuntutan internasional secara baik, sehingga sektor pertanian berkurang, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah tahun 1985 tetap tinggi. Peranan sektor jasa dan industri sangat membantu keberhasilan tersebut.

Indonesia membuka sistem ekonominya dengan deregulasi dan debirokratisasi (1988), dan ini disambut baik oleh dunia luar, tentu termasuk negara sahabat dan badan donor internasional yang bersedia meminjamkan modal.

Sebaliknya yang lebih kelihatan dari sudut pandang mikro melalui kasus-kasus adalah ketimpangan, distribusi hasil pembangunan dan akses jasa yang tidak merata. Juga ketimpangan antar daerah lebih menyolok (Mubyarto).

Jumlah pengangguran terselubung masih sangat besar dan pertumbuhan industri belum mampu menyerap tenaga kerja 2,1 juta orang yang setiap tahun dalam Pelita V memasuki pasaran kerja.

Pengangguran pemuda berpendidikan tampaknya juga masih cukup serius; produktivitas angkatan kerja berarti belum optimal dan golongan umur yang tergantung (dependent) dari golongan yang produktif masih besar. Kesenjangan-kesenjangan seperti ini cenderung lebih dihayati oleh ilmuwan-ilmuwan sosial lain dari pada ahli ekonomi.

Dialog kemiskinan sebenarnya mengandung perbedaan sudut pandang: disatu pihak tekanan pada produksi dan produktivitas masyarakat sebagai keseluruhan, dipihak lain tekanan pada pembagian yang merata, keadilan dsb.

Sudah difahami umum bahwa falsafah negara memang mengikat kita kepada tujuan-tujuan yang lebih manusiawi itu, dan tidak semata-mata mengunggulkan angka pertumbuhan ekonomi tinggi.

Walaupun bagaimana dialog akan berkembang, dan ukuran mutlak seperti konsumsi pangan sebagai tolok ukur tidak akan mencukupi lagi, faktor-faktor tersebut juga tidak dapat ditiadakan karena menjadi kebutuhan dasar manusia.

Semakin kebutuhan dasar terpenuhi, apapun tolok ukurnya, semakin kebutuhan sekunder dan tersier akan tampil ke depan dan ukuran kepuasan semakin banyak akses terhadap berbagai jenis pelayanan akan menjadi tuntutan.

Garis kemiskinan dengan perkataan lain akan semakin mengandung unsur-unsur yang relatif. Kesenjangan atau lapisan/golongan didalam masyarakat pun harus semakin diukur dengan membanding, artinya kemiskinan relatif menjadi lebih penting dari pada kemiskinan absolut.

Akhirnya kita akan menuju ke perbandingan antarnegara, serta mencari tolok ukur yang universal yang ditentukan oleh negara yang paling maju dan memiliki sistem jaminan sosial yang terbaik.

Setelah jaminan untuk kesehatan pendidikan dan hak atas kesempatan kerja, nanti akan menyusul jaminan pengangguran, jaminan liburan/cuti, jaminan hari tua, jaminan pendidikan dan seterusnya. Boleh dikatakan tiada akhirnya bila memang masyarakat dianggap turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat sebagai keseluruhan.

Untuk Biro Pusat Statistik mungkin masih ada tugas tambahan untuk mencari bentuk yang dapat merumuskan garis kemiskinan secara lebih tepat dari pada yang dimungkinkan dengan menggali data dari SUSENAS.

Pola konsumsi yang sementara ini merupakan *proxy* dekat garis kemiskinan perlu dilengkapi lagi dengan sejumlah indikator yang mencerminkan potensi mendapat berbagai akses akan jasa. Potensi rendah juga menggambarkan garis kemiskinan (relatif) yang rendah, dan sebaliknya potensi yang besar mencerminkan "garis kemiskinan" yang tinggi.

## VIII. PANDANGAN TERHADAP EKONOMI SOSIOLOGI

Demikian, sepanjang dapat penulis mengerti, Sajogyo juga mempunyai pandangan terhadap pendekatan ekonomi, dan tentu materi ekonomi merupakan bagian yang penting untuk analisa sosiologi.

Namun demikian lebih banyak dan kaya hubungan antar pelaku sosial dalam masyarakat manusia dari pada sekedar antara "produsen - pemberi jasa - konsumen" yang menjadi pusat perhatian pakar ekonomi.

Ada jenis-jenis hubungan sosial yang tidak terutama dipengaruhi oleh pertimbangan mencari untung, atau mengefisienkan proses produksi. Kekuasaan mencari kedudukan dan gengsi, meraih penghargaan dan memperbesar kekuasaan adalah pertimbangan lain yang mendorong usaha manusia.

Dan ikhtiar seperti itu dilakukannya dengan pengorbanan yang tinggi, dan yang sering tak dapat lagi dibenarkan oleh rasionalisme ekonomi. Tujuan-tujuan sosial dan ekonomi mengarahkan perilaku manusia dalam masyarakat sehingga kedua segi harus dihayati dalam saling-kaitan erat.

Konsekuensi ini juga difahami Sajogyo yang sejak awal membesarkan Jurusan Sosial Ekonomi dalam Fakultas Pertanian, mula-mula dibawah bendera UI, dan sejak 1963 bernaung dibawah Institut Pertanian Bogor.

Istilah terpadu "sosial ekonomi" dalam terapannya di daerah pedesaan sepenuhnya dapat diterima oleh Sajogyo, dan pemisahan antara dua disiplin mungkin hanya dapat dibenarkan karena keterbatasan kemampuan pakar menguasai kedua bidang sekaligus.

Ditinjau dari segi "kesatuan" pendekatani yang saling melengkapi melalui disiplin sosiologi dan ekonomi itulah mungkin dapat disesalkan bahwa Fakultas Sosial Ekonomi Pertanian yang juga diidamkan Sajogyo sejak lama, belum terwujud sebelum Dr. Sajogyo mengakhiri masa bhaktinya pada bulan Mei 1991.

Hanya dapat kita harapkan bahwa idaman banyak kawan di Jurusan Sosial Ekonomi, bahwa apa yang diperjuangkan Sajogyo, akan sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam masa Sajogyo diberi kedudukan sebagai Gurubesar Emiritus, dan menjelang akhir Pelita V ini. Mungkin itu penghargaan kita padanya untuk seterusnya.

Bogor, 1 September 1991

Sediono M.P. Tjondronegoro

## **SAJOGYO.**

Penerbitan dan tulisan yang lebih tersimpan, terdaftar dan dapat ditelusuri dalam perpustakaan adalah dibawah nama *SAJOGYO* dan setelah 1973. Banyak karangan lain tentu tidak terbit juga dalam bentuk cetak, baik sebelum 1973 maupun setelah itu. Sejak 1950-an nama Kampto Utomo lebih tepat dijadikan reference, bahkan buku (terjemahan thesis transmigran spontan) beredar dalam akhir tahun 1970-an. Sebelum 1973 banyak tulisan dalam bentuk stensil atau bahkan tik biasa dan tidak mudah lagi ditelusuri.

Karangan-karangan sekitar Symposium Modernisasi Pedesaan (1964), sekitar pendirian PERHEPI dan BIMAS - Evaluasi. (1965-1970).

## SUMBER ACUAN DAN BACAAN

DANDEKAR & RATH (1970)

Poverty in India.

SAJOGYO, (1986)

Status of Social Science Teaching in Agricultural Education in Indonesia. Bogor Agricultural University, Bogor. 45 p.

(1986)

Tinjauan Tentang Perkembangan Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia dan Maknanya bagi Pembangunan Nasional oleh Sajogyo dalam angka Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV (KIPN). 30 p.

(1984)

Penelitian Evaluasi Pembangunan Desa : Laporan Akhir th. 1981-1982/Sajogyo.-- Bogor : LPSP-IPB, 1984.

(1984)

Penelitian Indikator Sosial Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan : Laporan Akhir 1982/1983/ Sajogyo.-- Bogor : PSP-LP IPB, 1984. IX, 105 p., tabl., ill., (Stensilan).

(1983)

"Nutrition Consequence in "Growth with Equity" and Participation" Approaches: The Indonesia Experience Paper for the Symposium "Nutrition Consequences of Development Programmes" at the Fourth Asian Congress of Nutrition Bangkok, on 2<sup>nd</sup> November 1983. 14 p. (Stensilan)

(1983)

Pangan dan Gizi dalam Pembangunan Semesta.

Makalah untuk Seminar Program Penelitian dan Pengembangan guna Menunjang Pelita IV daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah, di Yogyakarta/PIPR, tanggal 7 - 8 Desember, 1983.

(penyunting) (1982)

Bungarampai perekonomian Desa/Penyunting Sajogyo. Yayasan Agro Ekonomika, Yayasan Obor Indonesia, 1982 XI., 299 p., ( Buku Cetak ).

(1982)

Ccseas-Iseas joint International conference on Village-level modernization: Livelihoods, resources and cultural continuity, Singapore 21 - 25 June, 1982.

POVERTY AND LIVELIHOOD OPPORTUNITIES IN INDONESIA?/ Sajogyo.--Bogor : Indonesia, '82.

31p., (stensilan) jilid Ijo Muda.

- SAJOGYO, (ed.) (1982)  
Ekologi Pedesaan; Sebuah bunga rampai Jakarta, C.V. Rajawali.  
Untuk Yayasan Obor.
- (penyunting) (1982)  
Penelitian Aksi atas Pembinaan Pembangunan Masyarakat Desa,  
Bagian I./Sajogyo (penyunting). Bogor : LPSP-IPB, 1982.  
66 p., tabs., bibl., ( Buku Stensilan )
- (penyunting) (1982)  
Penelitian Aksi atas Pembinaan Pembangunan Masyarakat Desa,  
Bagian II./Sajogyo (penyunting). Bogor : LPSP-IPB, 1982. 119 p.,  
tabs., bibl., ( Buku Stensilan )
- (1982)  
Proyek Studi Sektoral Regional "Pembinaan Penelitian Evaluasi  
Pembangunan Desa"/Sajogyo.--  
Bogor : LPSP-IPB, 1982.  
28 p., tabl., Stensilan (2 ekspl.) Jilid Ijo.
- (1981)  
Menuju kecukupan pangan suatu kerangka kebijaksanaan dan  
evaluasi/Makalah utama disajikan pada Simposium Nasional Pangan  
dan Gizi di Yogyakarta, 26 - 28 Nopember 1981.
- (1981)  
Status of Social Science Teaching in Agricultural Education in  
Indonesia/Sajogyo.-- Bogor : Bogor Agricultural University. (1980)  
Agrarian problems in Indonesia/Sajogyo. Bogor : LPSP - IPB., 1980.  
8 p., tabl. (2 ekspl.)
- (1980)  
Mencari data indikator "Potensi" dan "Kualitas hidup" dan menilai  
sampai mana kebutuhan dasar tercukupi / Sajogyo. Bogor : LPSP -  
IPB., 1980.9 p., tabl.
- (1980)  
Penelitian Aksi Perihal partisipasi dalam Pembangunan Pedesaan :  
Laporan kemajuan 1979/1980/ Sajogyo.-- Bogor : Institut Pertanian  
Bogor, 1980. VI, 98 p., tab..
- (1980)  
Penelitian Aksi perihal partisipasi dalam Pembangunan Pedesaan  
(Pembinaan Proyek Action-oriented research in rural development) :  
Laporan Akhir Proyek no.20/FAT-IPB/1979-1980./Sajogyo.-- Bogor :  
LPSP-IPB, 1980.V., 154 p., tab.
- (1980)  
Penelitian Aksi perihal partisipasi dalam Pembangunan Pedesaan  
(Laporan Akhir Proyek no.20/F4T-IPB/1979-1980./Sajogyo... Bogor :  
LPSP-IPB, 1980.V., 144 p., tab., (2 ekspl.).

**SAJOGYO, (1980)**

Pola Pendidikan : Latihan Motivator Transmigrasi / Sajogyo--  
Bogor : LPSP-IPB, 1980. 9 p., ( 2 ekspl.).

(1980)

Rural Development Programs in Indonesia Village Solidarity and  
other goals/Sajogyo.- Bogor : LPSP-IPB, 1980. 46 p.

(1979)

Bagaimana Melembagakan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga?  
Bogor, LPSP - IPB, 1978. 22 p..

(1979)

Garis Kemiskinan dan Kebutuhan minimum pangan.  
Bogor, LPSP-IPB. 8 p., bib..

(1979)

Konfrensi sedunia perobahan agraria dan pembangunan pedesaan  
(Roma, 1979).

Deklarasi prinsip-prinsip dan perobahan Aksi / Sajogyo, LPSP-IPB,  
1979. 13 p.

(1979)

Land and Labour in Indonesia. 33 p..

(1979)

Menuju partisipasi mendasar golongan petani dalam Dasa Warsa  
1980-an / Sajogyo.--Bogor : LPSP - IPB., 1979. 15 p., ( 3 ekspl.)

(1979)

Pedoman untuk kader di desa dalam membina taman gizi.  
Bogor, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB, 1977.  
120 p., fig..

(1979)

Pengantar Sosiologi, Pedoman kuliah ke I.  
Bogor, Bagian Sosiologi Pedesaan dan Penyuluhan Dept. Ilmu-ilmu  
Sosial Fak. Pertanian IPB, 1971 II, 45 p..

(1979)

Pengaruh teknologi pada perkembangan Masyarakat Pedesaan /  
Sajogyo.-- Bogor : LPSP IPB, 1979. 15 p., (3 ekspl.).

(1978)

Kumpulan baaean sosiologi pedesaan.  
Bogor, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB., 1978  
437 p., bib..

(1978)

"Lapisan Masyarakat Paling Lemah" di Pedesaan Jawa. dalam Prima  
No.3, April 1978

**SAJOGYO, (1978)**

Penelitian atas tingkat pendapatan rumahtangga dan kecukupan pangan 1977/1979, (laporan kemajuan tahap pertama Proyek Studi Sektoral Regional). Bogor, LPSP-IPB, 1978. 21 p., tabs., bib., appendices.

(et al) (1978)

Proyek Studi Sektoral/Regional : Penelitian atas Penyuluhan Gizi di Masyarakat Pedesaan Jawa Barat, laporan kemajuan triwulan I, 1977/1978. Bogor, LPSP-IPB, 1978. V. (variation pagimg)

(et al.) (1977)

Buku Pedoman untuk PLKB dalam membina taman gizi.  
BKKBN, 1977.

XIII, 614 p., tabs., graphs., illuss., index.

(ketua Team) (1976)

Menuju gizi baik yang merata di pedesaan dan di kota.

Bogor, Proyek Gizi Masyarakat IPB., 1976. VI, 208 p., tabs., fig..  
(variation paging)

(1976)

Reneana Lokakarya : Pengelolaan Penyuluhan Gizi di IPB, Bogor, 1 - 6 Nopember 1976./Sajogyo.--Bogor : IPB, 1976.

(1975)

Memasyarakatkan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).: Kutipan dari Majalah "Berita ilmu pengetahuan dan teknologi"./ oleh Sajogyo.-- Bogor : LPSP - IPB., 197541 p., tab.

(1975)

Rural Development Programs in Indonesia Village Solidarity and other goals/Sajogyo.-- Bogor : Agricultural University, 1975.

(1975)

Rural Development Programs in Indonesia Village Solidarity and other goals. (Prepared for the Study Group on Approaches to Rural Development in Asia (ACDA)), 1974-1975.

66 p. (seeond draft).

(1975)

Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, ANP Evaluasi Study 1973.

Bogor, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB, 1975.

XIV, 195 p., tabs., ehart..

(1974)

Ringkasan Hasil Survey Evaluasi Proyek U.P.G.K. (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga). Bogor, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB, 1974. 27 p., tabs., appendices.

(1974)

Some Notes on Research Planning and Field Collection. (Singapore, Oct. 28 - Nov. 2, 1974) 18 p., bib..

\_\_\_\_\_(1972/73)

Modernisation without development in Rural Java.

(Contributed to the study on Changes in Agrarian Structures,  
Organized by F.A.O. of the U.N., 1972/1973. 77 p., tabs., bib..

\_\_\_\_\_(1973)

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Survey UPGK 1972/1973.

Juli 1972 - 17 Peb. 1973. Bogor, IPB, 1973.

\_\_\_\_\_(ed.) (1973)

Usaha Perbaikan Gizi Keluarga - Applied Nutrition

Program Evaluation

Bogor, LPSP.

\_\_\_\_\_(1971)

Rapat Kelompok Tehnis Nasional Rice Research Program Ke II.

(Bogor, 3 - 5 April 1971) & W.L. COLLIER (1970)

Evaluasi Bimas (Laporan Awal). Bogor SAEI

\_\_\_\_\_(1957)

Masyarakat Transmigrasi Spontan di daerah Way Sekampung, Lampung.  
Bogor, University Indonesia Diss. Fak. Pertanian U.I.

TAN, M.G. (1970)

Social & Cultural Aspects of food patterns and food  
habits in 5 rural areas in Indonesia. Jakarta, LIPI

WORLD BANK (1990)

Poverty Assessment and Strategy Report. Washington, the World Bank.